

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN PANGAN ERA KEPEMIMPINAN SOEHARTO
DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

***THE COMPARISON OF FOOD POLICY ERA THE LEADERSHIP OF SOEHARTO
AND SUSILO BAMBANG YUDHOYONO***

(disubmit 20 Februari 2018, direvisi 15 Mei 2018, diterima 30 Juni 2018)

Iman Amanda Permatasari¹, dan Junior Hendri Wijaya²

¹Biro Sumber Daya Aset, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

^{1,2}Jl. Brawijaya, Taman Tirto Kasihan Bantul, DIY, Indonesia

Corresponding Author: imanamanda4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan pangan pada masa kepemimpinan presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Unit analisa data yang diambil berupa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono serta kebijakan pangan, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumentasi. Kemudian, teknik analisa datanya terdiri dari: *Heuristik*, Kritik dan Analisis Saran, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono baru berada pada posisi ketahanan pangan, tidak bisa mencapai kemandirian atau bahkan kedaulatan pangan. Soeharto memiliki kebijakan Swasembada beras dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan Revitalisasi Pertanian. Keduanya menggunakan strategi masing-masing dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat pengaruh positif dan juga negatif dari kepemimpinan keduanya terhadap berjalannya kebijakan pangan.

Kata kunci: Kebijakan, Pangan, Kepemimpinan, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to identify comparative food policies during the presidency of President Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono. The data analysis unit obtained is the management of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono and the nutritional guidelines taken. The type of research is historical research. Data collection techniques are the study documents. Then the data analysis techniques consist of heuristics, critique and analysis of suggestions, interpretation and historiography. The results of this study show that the position of food policy during the leadership of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono is unable to achieve independence or even the sovereignty of food. Suharto has a policy of self-sufficiency in rice and Susilo Bambang Yudhoyono has a policy of reviving agriculture. Both have their own strategies in implementing the policy. In addition, it has a positive and negative impact on its leadership in food policy.

Keywords: Policy, Food, Leadership, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesian

PENDAHULUAN

Indonesia melalui program Swasembada berasnya dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada tahun 1966 dan mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras yang dilakukan pada tahun 1984. Perbedaan signifikan terlihat jelas sejak tahun 1969 yang hanya mampu menghasilkan 12,2 juta ton beras menjadi 25,8 juta ton beras pada tahun 1984. Kesuksesan tersebutlah yang kemudian membawa Presiden Soeharto terlibat dalam konferensi ke-23 FAO, Pada 14 November 1985 (ARS: 2013)

Berbeda dengan Soeharto, seperti yang dilansir oleh Liputan 6, dikatakan bahwa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dianggap gagal dalam program swasembada lima komoditas pangan yang terdiri dari beras, jagung, gula, kedelai dan daging sapi. Pengamat pertanian Khudori mengatakan, target surplus beras yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah 10 ton tetapi pada kenyataannya hanya tercapai sebanyak 2 ton. Kemudian, Ia juga mengatakan bahwa telah terjadi ketimpangan antara produksi dalam negeri dengan permintaan, sehingga pemerintah harus melakukan impor yang cukup besar demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan mantan presiden

Indonesia yang menjabat lebih dari satu kali periode kepemimpinan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dari setiap periodenya akan sangat menarik untuk dikaji, salah satunya dalam hal kebijakan pangan. Keduanya memiliki latar belakang militer, tetapi mempunyai pemikiran mendalam berpikiran tentang pangan dan titik pentingnya bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Terlepas dari kekurangannya, presiden Soeharto memiliki obsesi yang sangat besar dalam hal kebijakan pangan, terutama komitmennya dalam membangun agribisnis padi. Hal tersebut dilihat dari tiga tujuan dasar yang diusahakan, diantaranya: a) memantapkan ketahanan pangan nasional, b) memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional, c) meningkatkan pendapatan petani. (Simatupang dan Rusastra, 2004)

Susilo Bambang Yudhoyono sendiri memiliki gelar Doctor dari Institut Pertanian Bogor, tetapi pada beberapa temuan menyebutkan bahwa Soeharto dianggap lebih sukses dalam menjalankan kebijakan pangan.

Padahal, upaya penguatan sektor pertanian pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sempat tampak hasilnya dengan peningkatan produksi padi pada tahun 2008. Karena hal itulah Indonesia kembali pada posisi swasembada beras. Pada masa-masa ini juga,

produktivitas pertanian terus-menerus diperjuangkan, sehingga antara tahun 2007-2008, laju peningkatan produksi semakin besar, yaitu sekitar 5,46. Angka tersebut merupakan capaian terbaik selama 10 tahun terakhir pelaksanaan kebijakan pangan. (Hakim, 2016)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan metode penelitian sejarah. Menurut Sjamsuddin dan Ismaun, metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita sejarah yang dapat dipercaya. (Efqi, 2015)

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data didapatkan dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber-sumber tersebut seperti jurnal, buku, majalah, laporan, dan lain sebagainya. Unit analisis data dalam penelitian ini terfokus pada kepemimpinan masa Pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, serta kebijakan pangan pada masa pemerintahan keduanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber-

sumber yang berupa dokumentasi. Baik itu dokumentasi secara tulisan (Buku, jurnal, berita, internet, dll), lisan, maupun berupa gambar, dengan pertimbangan bahwa data-data tersebut relevan dengan permasalahan penelitian yang penulis ambil.

Teknik Analisa Data dari penelitian ini adalah sebagai berikut; (a) Heuristik. Heuristik adalah pengumpulan seluruh data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Data-data tersebut adalah data dari buku, jurnal ilmiah, majalah, laporan, berita, dan lain sebagainya. (b) Kritik dan Analisis Saran. Kritik dan analisis saran adalah proses mengkritisi sumber-sumber yang telah didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti. Kemudian sumber-sumber tersebut dipilih kembali, sehingga didapatkan sumber yang sesuai bagi penelitian. Dalam proses ini, data-data yang ada disaring dan diambil yang validnya saja. (c) Interpretasi. Interpretasi adalah proses menafsirkan semua fakta-fakta yang telah diperoleh sebelumnya dengan mempertimbangkan data-data yang ada. Setelah itu, penulis menafsirkan fakta-fakta yang diterima tersebut selama penelitian dilakukan. (d) Historiografi. Setelah melakukan pengumpulan data, melakukan kritik dan analisis saran terhadap data, dan kemudian ditafsirkan, selanjutnya penulis menuangkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Pangan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono

Pemikiran pangan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilihat melalui tabel 1:

Tabel 1. Perbandingan Pemikiran Pangan Soeharto-Susilo Bambang Yudhoyono

No	Aspek Perbandingan	Soeharto	Susilo Bambang Yudhoyono
1	Pemikiran Dasar	<i>Food is my last defence line.</i>	Kemandirian pangan sama pentingnya dengan kemandirian militer.
2	Background Kehidupan	Berasal dan dibesarkan dilingkungan pertanian.	Mendapat gelar Doktor pertanian di Institut Pertanian Bogor.
3	Kebijakan yang diambil	<ul style="list-style-type: none"> - Swasembada Pangan - Swaembada Beras - Penerapan Revolusi Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi Pertanian - Swasembada lima komoditas pangan - Kebijakan Impor
4	Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Suksesnya program perberasan dianggap mempengaruhi proram Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) - Kondisi Politik yang tajam dianggap dapat diatasi dengan adanya ketahanan, ketersediaan, kecukupan dan keterjangkauan pangan 	Revitalisasi Pertanian merupakan pernyataan politik pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional.

PERBANDINGAN KEBIJAKAN PANGAN SOEHARTO – SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pemikiran Dasar dan Posisi Kebijakan Pangan Soeharto

Presiden Soeharto pernah mengatakan bahwa “*Food is my last defence line*”. Kebijakan pangan pada masa ini sebenarnya sudah hampir mendekati kategori kemandirian pangan. Hanya saja, terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi secara keseluruhan. Dengan kata lain, kebijakan pangan era Soeharto belum mampu mencapai kedaulatan pangan.

Menurut Hariyadi (2011), terdapat indikator-indikator dalam konsep ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Berikut ini adalah hasil analisis

peneliti melalui indikator-indikator tersebut:

Apabila dilihat dari definisi ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan, posisi kebijakan pangan pada masa Soeharto berada pada posisi ketahanan, sesuai dengan definisi ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau. Hal tersebut dilihat dari adanya kebijakan swasembada beras yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kebijakan pangan pada masa ini belum sampai pada tahap kemandirian pangan ataupun kedaulatan pangan karena swasembada

beras atau pangan belum mampu bertahan lama. Keterlibatan masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal pun tidak terlihat.

Apabila dilihat dari indikator ketersediaan pangan yang terdiri dari kecukupan jumlah, kecukupan mutu, kecukupan gizi dan keamanan, maka kebijakan pangan pada masa Soeharto telah memenuhi kecukupan jumlah melalui tersedianya beras dan bahkan menjadi negara yang bebas dari krisis pangan pada masa itu.

Apabila dilihat dari keterjangkauan pangan, maka kebijakan pangan pada masa Soeharto telah memenuhi indikator keterjangkauan fisik. Hal ini terbukti dari sempat terpenuhinya kebutuhan beras dalam negeri melalui swasembada beras, meskipun hal tersebut tidak bertahan lama.

Apabila dilihat dari indikator konsumsi pangan, maka pangan pada masa Soeharto telah memenuhi indikator kualitas pengolahan pangan. Hal tersebut dilihat dari dilaksanakannya kebijakan sarana produksi, pupuk dan pestisida, kebijakan penanganan pasca panen, serta kebijakan sarana penyimpanan yang merupakan bagian dari konsep *Bufferstock*.

Apabila dilihat dari indikator kemandirian pangan, tingkat ketergantungan impor pangan dapat diatasi oleh pemerintah di bawah kepemimpinan

Soeharto. Pemerintah berhasil memajukan pertanian Indonesia dengan melibatkan hasil produksi dalam negeri dan tidak terlalu bergantung pada produksi luar negeri. Begitupun apabila dilihat dari indikator tingkat ketergantungan impor sarana produksi pangan. Pemerintah telah berhasil meningkatkan produksi pupuk dalam negeri. Kebijakan pada bidang perbenihan dengan menghasilkan bibit-bibit unggul sendiri melalui penelitian-penelitian pun telah dilakukan.

Apabila dilihat dari indikator kedaulatan, maka kebijakan pangan pada masa Soeharto dapat dikatakan belum memenuhi indikator-indikator penyusunannya. Tingkat keanekaragaman sumberdaya pangan lokal ternyata terlalu fokus kepada produksi beras pada masa dilaksanakannya swasembada beras. Tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pangan juga tidak mampu diperlihatkan karena semua kebijakan berada di tangan pemerintah terutama BULOG (Badan Urusan Logistik). Revolusi Hijau melalui penggunaan pupuk dan pestisida kimia telah merusak lingkungan dan mengurangi produksi pangan nasional. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak tidak dapat diperlihatkan. Petani miskin di pedesaan semakin tertindas dengan adanya kesenjangan sosial sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan

pengembangan sarana prasarana produksi pertanian pangan yang lebih berpihak kepada petani kalangan menengah.

Kebijakan Swasembada Beras

Indikator keberhasilan Swasembada Beras pada masa itu dilihat dari perbandingan antara jumlah pengadaan beras dan kebutuhan penyaluran. Pada tahun 1984/1985 jumlah pengadaan beras dalam negeri adalah sebesar 2.382 juta ton, dan kebutuhan penyalurannya hanya sebesar 1.612 juta ton. Sehingga, surplus beras pada waktu itu adalah sebesar 0,770 juta ton. Kemudian pada tahun 1985/1986, hal tersebut kembali terulang. Jumlah pengadaan beras adalah sebesar 1.953 juta ton, sementara kebutuhan penyalurannya adalah sebesar 1,549 juta ton. Sehingga pada waktu itu surplus beras terjadi pada kisaran angka 0,404 juta ton.

Strategi Kebijakan

Soeharto dan BULOG (Badan Urusan Logistik)

Badan Urusan Logistik atau yang lebih dikenal dengan nama BULOG sebenarnya telah dibentuk pada masa pemerintahan transisi, yakni ketika kepemimpinan Soekarno akan digantikan oleh Soeharto. Pada awal didirikan BULOG memiliki fungsi sebagai pembeli beras tunggal. Kemudian, ugas dan fungsinya semakin bertambah. Dapat

dikatakan BULOG adalah pengatur manajemen pangan yang diberikan kekuasaan secara eksklusif oleh pemerintah Indonesia.

Soeharto bersama BULOG menjadi poros utama kebijakan pangan Indonesia, dan mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras. Meskipun pada perjalanannya, hal tersebut dianggap tidak berjalan lama.

Konsep Bufferstock Orde Baru

Bufferstock sebenarnya terdiri dari lima unsur pokok, yaitu: (Arifin: 1994)

Kebijakan Harga Dasar. Penentuan harga dasar ditentukan oleh forum antar departemen. Namun, tetap terjalin koordinasi dengan Kantor Menko Ekuin. Selain itu, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan Departemen Koperasi pun ikut terlibat dalam penetapan harga dasar gabah.

Saluran Pembelian. BULOG menggunakan saluran tataniaga berupa Koperasi Unit Desa (KUD), dan kontraktor atau penggilingan beras swasta.

Sarana Penyimpanan. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto membangun sarana penyimpanan berupa gudang, karena cadangan beras hanya ditempatkan di gudang milik swasta, yang kondisinya tidak sesuai syarat penyimpanan. Selain itu, BULOG memiliki posisi yang sangat rendah sebagai pemakai

jasa pergudangan, karena semua ditentukan oleh besar kecilnya uang sewa dan persaingan dengan komoditas yang juga memerlukan gudang. Kemudian, adanya ketidakmerataan penyediaan ruang bagi gudang penyimpanan, sementara penyediaan ruang merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya keamanan pangan. Jika penyediaan ruang tidak merata, maka akan ditemukan kerusakan atau penurunan mutu tanaman pangan itu sendiri.

Harga langit-langit. Harga langit-langit ditentukan secara langsung oleh BULOG (Badan Urusan Logistik) tanpa adanya hubungan koordinatif dengan lembaga-lembaga seperti Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, ataupun Departemen Koperasi.

Saluran Distribusi. BULOG bekerjasama dengan Koperasi Pegawai

Negeri, Koperasi ABRI, Koperasi Pelayaran Rakyat, Koperasi Pedagang pasar, dan juga pedagang-pedagang swasta.

Kebijakan Peningkatan Produksi Pangan Nasional

Adapun kebijakan produksi pangan nasional dapat diterangkan sebagai berikut: (Arifin: 1994)

Kebijakan Bidang Perbenihan melalui penelitian-penelitian untuk dapat menghasilkan bibit-bibit unggul yang memiliki tingkat resistensi yang tinggi terhadap pemupukan dan serangan hama serta penyakit.

Kebijakan Sarana Produksi, Pupuk dan Pestisida. Pemerintah mencoba meningkatkan produksi pupuk dan pestisida. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel 2 dan 3:

Tabel 2. Peningkatan Produksi Pupuk Urea, TSP Dan Za

Jenis	Angka awal	Angka akhir	Rata-rata per tahun
Urea	85,4 ribu ton	2.204,8 ribu ton	310 %
TSP	114,4 ribu ton	783,75 ribu ton	26,5 %
ZA	49,7 ribu ton	208 ribu ton	-

Sumber: (Arifin, 1994)

Tabel 3. Peningkatan Penggunaan Pestisida Per Tahun 1969-1983

Jenis Pestisida	Tahun 1969	Tahun 1983	Peningkatan
Insektisida	1.209,3 ton	12.982,4 ton	11,773,1 ton
Rodentisida	33,7 ton	171,2 ton	137,5 ton

Sumber: (Arifin, 1994)

Kebijakan Bidang Perkreditan. Pemerintah menerapkan kebijaksanaan di bidang perkreditan, yang dikenal dengan kredit BIMAS (Bimbingan Masal) dan INMAS (Intensifikasi Masal) untuk

menjawab setiap permasalahan permodalan tersebut.

Kebijakan Bidang Perairan. Pemerintah membangun jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik di

pulau Jawa saja, ataupun di luar Jawa. Rehabilitasi jaringan dan pembukaan lahan sawah dengan irigasi konvensional pun telah dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan Diversifikasi Usaha Tani. Merupakan usaha penganejaragaman usaha tani untuk mengurangi adanya resiko kegagalan dan ketergantungan, meningkatkan intensitas penggunaan lahan serta tenaga kerja. Dengan tercapainya ketiga hal tersebut maka areal panen dapat mengalami peningkatan. Peningkatan areal panen tersebut juga berimbas kepada peningkatan produksi dan pendapatan petani. Sehingga petani mengalami sedikit peningkatan dalam hal kesejahteraan.

Kebijakan Bidang Penyuluhan. Pemerintah melakukan kegiatan kursus tani, peragaan, informasi pertanian dan pembinaan terhadap kelompok tani atau himpunan petani. Selain itu pemerintah berhasil mencetak 14.049 penyuluh pertanian, serta 606 penyuluh pertanian spesialis yang kemudian tersebar di 26 provinsi Indonesia pada masa itu.

Kebijakan Harga Input dan Output. Kebijaksanaan harga produksi sendiri adalah jaminan harga hasil produksi pertanian yang diberikan melalui kebijaksanaan harga dasar, atau melalui jaminan harga dan jaminan pemasaran. Pemerintah juga menerapkan kebijakan pemberian subsidi sarana produksi untuk para petani.

Kebijakan Penanganan Pasca Panen. Tindakan pasca panen bisa berupa tindakan sebelum pemasaran biasa, ataupun berupa penanganan pengolahan hasil produksi panen secara langsung. Kedua tindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi kerugian setelah panen, yang berupa penyusutan hasil produksi sebagai efek dari penyimpanan, pengolahan atau serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum pemasaran.

Pemerintah melaksanakan kebijaksanaan penanganan pasca panen melalui perbaikan penanganan pasca panen. Diharapkan dengan adanya perbaikan penanganan pasca panen, kualitas hasil produksi yang diperoleh bisa menjadi lebih baik. Kemudian, apabila hasil produksi yang dihasilkan berkualitas baik, maka harga akan meningkat dan usaha menyejahterakan petani dapat tercapai.

Kebijakan Deregulasi

Kebijakan Deregulasi dilakukan pada semua sektor atau semua bidang. Hal tersebut dapat memengaruhi kebijakan pangan dalam negeri, seperti subsidi pupuk, subsidi bunga, dan pengaturan impor. Adanya subsidi pupuk, subsidi bunga dan pengaturan impor, akan memperlihatkan sejauh mana kebijakan pangan dapat dijalankan. Berhasilnya kebijakan deregulasi, menandakan keberhasilan di bidang pangan. Karena permasalahan

tentang pangan tidak hanya tertuju pada cukup atau tidaknya persediaan pangan masyarakat, tetapi juga pada sejahtera atau tidaknya petani Indonesia, serta berpengaruh atau tidaknya keberhasilan pangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setting Politik

Sistem sentralistik yang berjalan pada masa kepemimpinan Soeharto membuat petani Indonesia mau tidak mau menerima setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, tidak heran apabila petani pada masa kepemimpinan Soeharto, terlihat begitu mendukung kebijakan pangan atau pertanian Indonesia. Petani Indonesia secara gencar menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan tanpa bisa mengeluarkan protes atas ketidaksetujuannya apabila kebijakan tersebut dianggap tidak memihak petani.

Sistem yang sentralistik tersebut juga berpengaruh kepada keberhasilan swasembada yang dilakukan pemerintah. Sebab, melalui sistem yang dapat dikatakan memaksa tersebut, produksi pangan dalam negeri berhasil ditingkatkan, terutama pada komoditas beras. Namun, sisi negatif yang dihasilkan oleh sistem sentralistik adalah adanya fakta bahwa rakyat tidak mampu makan nasi karena harga beras yang bisa sangat mahal.

POLITIK PANGAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pemikiran Dasar dan Posisi Politik Pangan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seseorang yang berlatar belakang militer, berpendapat bahwa kemandirian pangan sama pentingnya dengan kemandirian militer. Posisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono berada hanya pada posisi ketahanan pangan. Berikut ini adalah hasil analisis peneliti jika dikorelasikan dengan indikator ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan milik Purwiyanto Hariyadi:

Apabila dilihat dari definisi ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan, maka kebijakan pangannya masih berada pada posisi ketahanan pangan. Pemikiran pemerintah baru sampai pada tahap terpenuhinya pangan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, tidak heran apabila kebijakan impor pada masa ini menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Apabila dilihat dari indikator ketersediaan pangan, pemerintah berusaha memenuhi kecukupan jumlah komoditas pangan dengan melakukan impor bahan pangan dan sejumlah kebutuhan pangan dalam negeri. Dengan kebijakan impor

tersebut pemerintah mengharapkan bahwa kecukupan mutu dan gizi masyarakat dapat terpenuhi. Melalui kecukupan mutu dan gizi maka seharusnya keamanan pangan dapat diperlihatkan. Akan tetapi, pemerataan pangan yang diharapkan dapat tersalurkan kepada masyarakat Indonesia belum dapat terpenuhi. Masih banyak kasus-kasus kekurangan gizi, seperti busung lapar.

Apabila dilihat dari indikator keterjangkauan pangan, pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono memang telah berusaha untuk melakukan pemerataan kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia. Namun, dikarenakan kurangnya sarana pengangkutan dan distribusi, maka hal tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Contohnya, di Nusa Tenggara Timur yang merupakan sentra penghasil sapi, tetapi pendistribusian tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, harga beberapa komoditas pangan pada masa ini terus mengalami lonjakan dan ketidakstabilan.

Apabila dilihat dari indikator konsumsi pangan, pemerintah pada masa ini telah berusaha untuk memperbaiki kualitas pengolahan pangan dan kualitas air. Hal tersebut dilihat melalui strategi kebijakan pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, serta revitalisasi industri pupuk. Pada masa ini, pemerintah

telah membangun 11 waduk dengan daya tampung sampai 79 juta meter kubik air untuk kebutuhan air irigasi pertanian. Pemerintah pun telah melakukan pembangunan pabrik-pabrik pupuk dan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) bagi petani Indonesia guna memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri.

Apabila dilihat dari indikator kemandirian, tingkat ketergantungan impor pangan Indonesia sangatlah tinggi. Beberapa komoditas pangan bahkan sengaja didatangkan dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan pangan. Begitupun dengan tingkat ketergantungan impor sarana produksi.

Apabila dilihat dari indikator kedaulatan, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tidak memperlihatkan adanya tingkat keanekaragaman sumberdaya pangan lokal, tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pangan, tingkat degaradasi mutu lingkungan ataupun tingkat kesejahteraan masyarakat petani Indonesia yang pada kenyataannya masih berada di bawah rata-rata.

Susilo Bambang Yudhoyono dan Revitalisasi Pertanian

Revitalisasi Pertanian merupakan janji politik dalam hal meningkatkan pendapatan pertanian. Revitalisasi pertanian adalah program yang dilaksanakan guna

tercapainya pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Strategi Kebijakan

Ada pun strategi kebijakan yang dilaksanakan adalah:

Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai bentuk dari pembangunan infrastruktur, telah dibangun 11 waduk dengan daya tampung sampai 79 juta meter kubik air. Pembangunan waduk tersebut salah satunya adalah untuk kebutuhan air irigasi pertanian. (RPJMN 2010-2014) Selama tahun 2010, melalui irigasi, pemerintah telah meningkatkan infrastruktur guna mencapai ketahanan dan kemandirian pangan. Wujud dari hal tersebut dilakukan melalui: a) Peningkatan luas layanan jaringan irigasi hingga 115 ribu hektar. b) Merehabilitasi 239,04 ribu hektar jaringan irigasi. c) Peningkatan 8,08 ribu hektar dan rehabilitasi 79,4 ribu hektar jaringan rawa. d) Membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi air sawah untuk mengairi 11,13 ribu hektar lahan. e) Membangun 45 embung dan merehabilitasi 12 waduk dan 21 embung.

Pemberdayaan Petani

Pada akhir tahun 2013, DPR telah mengesahkan RUU Desa sebagai landasan Yuridis bagi petani yang tinggal di pedesaan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Kemudian UU Perlindungan dan Pemberdayaan petani nomor 19 Tahun 2013 pun disahkan. Undang-undang ini menjelaskan tentang konsolidasi tanah, yang berhubungan dengan tanah pertanian terlantar dan tanah negara bebas yang dapat didistribusikan kepada petani, meskipun pada akhirnya hanya menjadi hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dikatakan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, pengembangan sistem sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, diharapkan petani Indonesia dapat diberdayakan. Mengingat sejak dahulu, petani selalu berada dalam posisi terbelakang. Pengetahuan akan cara bercocok tanam yang benar masih

tertinggal oleh petani dari negara lain. Sehingga, hasil pertanian tidak pernah maksimal dan berdampak pada pemenuhan pangan di Indonesia.

Hasil produksi yang minim dan kurang berkualitas tentu memengaruhi kelayakan konsumsi pangan dalam negeri. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang padat dan tidak sedikit, maka pola konsumsi pangan pun akan terpengaruh. Jika petani Indonesia tidak bisa menghasilkan produksi pangan yang berkualitas dan mencukupi, ditambah pemerintah tidak mengusahakan untuk memberdayakan petani Indonesia, maka kerawanan pangan akan terjadi. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan SBY dengan segala resiko dan pemikiran yang ada, diberlakukanlah kebijakan impor pangan yang justru memberatkan petani Indonesia.

Revitalisasi Industri Pupuk

Program revitalisasi pupuk bertujuan membantu petani Indonesia terhadap penyediaan pupuk. Pada kurun waktu 2010-2014, tiga pabrik urea berusia tua (Pusri II, Kujang 1A dan Kaltim 1) telah diganti, sekaligus membangun 1 pabrik yaitu PT Petrokimia Gresik yang bekapasitas 33,54 ton/tahun. Selain pembangunan pabrik pupuk urea, telah dilakukan pembangunan pabrik pupuk NPK yang bekapasitas 1 juta ton/tahun. Untuk pembangunan pabrik pupuk organik pun telah dilakukan dengan kapasitas 10.000 ton/tahun.

Selain melaksanakan revitalisasi industri pupuk, pada tahun 2008 sampai 2010, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan bantuan langsung pupuk dalam rangka mendukung usaha peningkatan produksi padi.

Tabel 4. Target dan Realisasi Penyaluran BLP Tahun 2008-2010

Jenis	Pupuk	2008	2009	2010
Organik Granul	Target	151.571	195,515.8	339,752
	Realisasi	142,067	190,064.7	335,343
	% Realisasi	93.73	97.71	98.70
Organik Cair	Target	1,010,473	1,296,772	2,265,014
	Realisasi	967,120	1,267,098	2,235,621
	% Realisasi	93.73	97.71	98.70
NPK (Ton)	Target	50,524	64,838.6	113,251
	Realisasi	47,365	63,354.9	111,781
	% Realisasi	93.73	97.71	98.70

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2011-2014.

Perbaikan Akses Petani Untuk Pendanaan Usaha.

SBY mencetuskan salah satu kebijakan peminjaman permodalan, bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR diberikan oleh

perbankan kepada UMKM-K termasuk usaha di bidang/sector pertanian. Tujuannya adalah meningkatkan akses kredit petani, kelompok tani/gabungan, mempercepat pertumbuhan sektor riil, mendukung program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah melakukan upaya intermediasi akses permodalan ke lembaga perbankan, melakukan identifikasi petani, membantu mencari penjamin pasar, dan melakukan pembinaan serta pendampingan. (http://agricenter.jogjaprovo.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=280)

Selain KUR, terdapat juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang dijadikan dasar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem mekanisme prosedur program, pendampingan, dan pendanaan stimulan guna penanggulangan kemiskinan yang berlanjut. (Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat : 29)

Swasembada Lima Komoditas Pangan

Swasembada lima komoditas pangan adalah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yang bertujuan untuk memenuhi pasokan pangan dalam negeri.

Lima komoditas tersebut terdiri dari Beras, Jagung, gula, kedelai, dan daging sapi. Akan tetapi, dalam perjalanannya, kebijakan tersebut dinyatakan gagal dikarenakan beberapa hal seperti: masalah distribusi, daya saing, adanya diversifikasi pangan, volume impor produk yang menekan neraca pembayaran, melonjaknya pertumbuhan jumlah penduduk dan menurunnya kontribusi pertanian dalam PDB. (WBP: 2014)

Setting Politik

Pada masa ini sistem politik berjalan sangat demokratis. Pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan saja, tetapi juga harus mampu menampung setiap masukan, kritik dan keinginan rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan yang sesungguhnya, sedangkan pemerintah adalah abdi negara yang mencoba memenuhi keinginan si pemegang kedaulatan (rakyat).

Hal tersebut memengaruhi kebijakan pertanian dan juga pemenuhan pangan dalam negeri. Petani Indonesia sulit digerakan, tidak seperti pada masa pemerintahan Seharto. Namun sisi positif yang dapat diambil adalah tertangkapnya pejabat negara yang korup, seperti yang terjadi pada kasus korupsi daging sapi pada masa itu. Sisi positif lainnya, banyak petani dan masyarakat Indonesia yang sebagian pemikiran serta harapannya dapat

disalurkan dengan baik. Realisasi dari hal tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan beras miskin (raskin).

PENGARUH KEPEMIMPINAN SOEHARTO DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERHADAP BERJALANNYA KEBIJAKAN PANGAN

Pengaruh Positif Kepemimpinan Soeharto

Setelah penerapan Revolusi Hijau di Indonesia, yang dimulai dari tahun 1960 an, melalui program BIMAS pada tahun 1968-1977, insus pada tahun 1979, supra insus pada tahun 1987, terjadi peningkatan produksi padi yang mencapai rata-rata 4,34 % per tahun. Sehingga tidak heran apabila pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Soeharto bersama jajarannya mencetak lahan pertanian yang disebut areal tanam intensifikasi. Pada tahun 1970 areal tanam intensifikasi adalah 2.084.000 hektar, dan luas tersebut meningkat pada tahun 1977 menjadi 5.280.000 hektar. Hal tersebut diimbangi dengan penggunaan pestisida, dan sarana produksi serta teknologi pertanian lainnya.

Menyelamatkan Indonesia dari Krisis Pangan. Dengan tercapainya peningkatan produksi pangan nasional, maka Indonesia dapat dikatakan selamat dari krisis pangan yang sempat melanda. Meskipun pada

akhirnya swasembada beras hanya berlangsung sebentar, tetapi Soeharto pernah mengantarkan Indonesia dalam menerima penghargaan dari FAO pada masa itu. Penghargaan tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara lain.

Menggerakkan petani Indonesia dalam Pertanian. Sejak menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, pembangunan di sektor pertanian memang telah menjadi prioritas utamanya. Tidak hanya itu, Soeharto memang boleh dikatakan mahir dalam bidang pertanian. Ia bahkan bisa mempraktikkan dengan baik bagaimana cara bercocok tanam yang benar dan tepat kepada petani Indonesia. Bukti dari kepeduliannya terhadap pertanian dan pangan Indonesia, salah satunya ditunjukkan dengan adanya pencetakan satu juta hektar sawah di daerah Kalimantan Tengah.

Sosok Soeharto sebagai seorang militer membuat semua kebijakan yang dijalankannya terlihat seperti kebijakan militer. Hal tersebut juga diterapkan dalam menjaring petani Indonesia untuk mau mengikuti kebijakan pangan yang diputuskan. Petani Indonesia ditaklukkan untuk berperan serta dalam menjangkau swasembada pangan ataupun swasembada beras.

Pengaruh Negatif Kepemimpinan Soeharto

Kemiskinan Petani Masih Mencolok. Keberhasilan pembangunan pertanian memunculkan adanya kesenjangan sosial di pedesaan. Revolusi hijau menyebabkan petani Indonesia yang miskin semakin miskin. Bukan hanya petani miskin, bahkan petani yang berada di kalangan menengah pun terkena dampaknya. Kesenjangan di pedesaan tersebut dikarenakan adanya teknologi-teknologi serta sarana pertanian yang disediakan oleh pemerintah.

Tabel 5. Pola Konsumsi Pangan Pokok Pada Beberapa Periode

Tahun	Pola Konsumsi Pangan Pokok
1954	Konsumsi beras mencapai 53 %, singkong 22,26%, jagung 18,9%, dan kentang 4,99%
1987	Konsumsi beras mencapai 81,1%, singkong 10,2%, dan jagung 7,82%
1999	Konsumsi pangan pokok berlanjut, jagung 31%, dan singkong 8,83%
2010	Terigu naik hampir 500% dalam 30 tahun dan singkong dan jagung hampir hilang.

(Malik, 2014)

Kebijakan Diskriminatif dan Keterpurukan Ketahanan Pangan Hingga Saat Ini. Berjalannya Revolusi Hijau telah membawa Indonesia dalam belenggu modernisasi sarana dan teknologi pertanian. Pemikiran bahwa penggunaan pupuk dan pestisida berbahan kimia dapat meningkatkan produksi pertanian, membuat pangan Indonesia tidak bisa berkembang.

Beras Sebagai Brometer Utama Pembangunan dan Alat Politik. Dalam 17 program Soeharto, untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan, Soeharto mengawalinya

Ketergantungan Terhadap Beras. Sebelum diterapkannya Revolusi Hijau, sebenarnya kebutuhan antar pangan seimbang. Baik itu beras, maupun sumber pangan yang lain. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Revolusi Hijau, maka produksi beras menjadi fokus utama. Hal tersebut berdampak kepada komoditas lain yang pada akhirnya terbengkalai. (Hermen Malik:2014) Berikut ini adalah fakta-fakta penyusutan pada bahan pangan non beras:

dengan meningkatkan produksi beras dalam negeri. Beras harus tersedia dan diproduksi setiap waktu dengan harga yang terjangkau. Beberapa kebijakan pun diambil untuk bisa mencapai apa yang diharapkan tersebut. Mulai dari kebijakan perbenihan, pupuk, pestisida ataupun keuangan serta kredit.

Dampak negatif dari adanya pemikiran beras sebagai alat politik memunculkan pandangan lain bahwa ketidaktersediaan beras akan melemahkan stabilitas politik Indonesia. Padahal jika dikaji kembali, pangan tidak harus selalu berhubungan dengan beras. Terdapat beberapa komoditas

lain yang sejatinya bisa menggantikan beras.

Swasembada Beras Tidak Bertahan Lama. Pada tahun 1990, Indonesia kembali mengalami defisit beras sebesar 48 ribu ton. Sebenarnya, peningkatan produksi padi masih tetap berjalan pada tahun 1990, meskipun berada dalam laju pertumbuhan yang sangat lambat, sekitar 1,40 %. Namun, tepat setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan

Pengaruh Positif Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Adanya Pembaruan Agraria Sebagai Program Nasional. Reforma Agraria sendiri dilaksanakan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin, untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penataan akses terhadap tanah. Kebijakan redistribusi tanah ini disebut juga dengan program pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan merupakan gabungan dari *Asset Reform* serta *Access Reform* yang kemudian disebut dengan *Land Reform Plus*. justru impor beras mencapai puncaknya. Kondisi impor beras tertinggi berada pada angka 4,74 juta ton.

Menandakan bahwa Indonesia sudah tidak berada pada kondisi swasembada beras.

Peningkatan Produksi Padi Secara Bertahap. Produksi beras pada tahun 2008 adalah 59,9 juta ton. Angka tersebut dianggap sebagai angka tertinggi dibandingkan dengan produksi yang selama ini dihasilkan. Dengan pencapaian tersebut Indonesia dapat terlepas dari krisis pangan yang melanda. Selain itu, beban bangsa dalam mengatasi krisis pasokan beras di pasar global dapat ditekan. Padahal, sebelumnya Indonesia adalah negara pengimpor beras tertinggi. Setiap kali Indonesia melakukan impor beras maka harga beras dunia akan mencapai USD 20-50/ton. (RPJMN 2010-2014)

Pengaruh Negatif Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Swasembada Berbasis Impor. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, volume Impor komoditas tanaman pangan Indonesia terus mengalami peningkatan.

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7621&coid=2&caid=2&gid=2

Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 6. Volume Impor Komoditas Tanaman Pangan Indonesia 2009-2013

No	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
1	Beras	250,225	687,582	2,744,002	1,297,330	353,485
2	Gandum	4,666,418	4,824,049	5,648,065	6,827,279	4,898,735
3	Gandum Olah	733,527	900,963	828,512	610,336	193,565
4	Jagung	338,798	1,527,517	3,207,657	1,797,876	1,915,589
5	Jagung Olah	82,443	259,294	103,327	91,555	49,553

No	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
6	Kedelai	1,320,865	1,740,505	2,088,616	2,105,629	1,212,494
7	Kedelai Olahan	22,145	32,158	36,896	23,134	17,568
8	Singkong	1,903	21	6	13,291	101
9	Singkong Olahan	166,813	249,832	435,419	842,835	193,329
10	Ubi Jalar	51	32	25	24	21
11	Kacang Tanah	194,002	229,393	251,004	197,963	221,403
12	Kacang Tanah Olahan	1,186	1,393	2,009	1,305	1,187

(Malik,2014).

Rendahnya Kesejahteraan Petani. Kebijakan impor membuat pasar Indonesia dikuasai oleh pihak luar, sehingga petani tidak memiliki tempat di pasar sendiri, tak lagi dipercaya sebagai produsen utama bahan pangan. Bahan pangan dari luar negeri dianggap lebih berkualitas jika dibandingkan dengan yang dihasilkan petani Indonesia. hal ini bukan tanpa alasan. Mereka tidak memiliki cukup modal untuk mendapatkan sarana dan teknologi pertanian yang baik. Kondisi alam pun seringkali menjadi hambatan bagi produksi kebutuhan pangan. Keadaan tersebut diperburuk oleh adanya korupsi demi kepentingan pribadi para pejabat politik.

Harga Kebutuhan Pangan yang Terus Meningkat. Pada masa ini, harga kebutuhan pokok terus meroket. Misalnya untuk harga daging sapi yang sempat mencapai Rp. 105.000,00 per kilo. Tidak hanya itu, harga telur sampai cabai pun meroket. Harga telur mencapai Rp. 20.000,00 sampai Rp. 22.000,00 per papan. Dan harga cabai sempat mencapai Rp. 60.000,00 per kilo. (Adam, dkk: 2015) .

Industrialisasi Menghambat Produksi Padi. Adanya alih fungsi lahan pertanian

menjadi non pemukiman dan lahan non pertanian, menyebabkan produksi padi menurun. Sekitar 56%-60% produksi padi bertumpu pada sawah-sawah subur yang berada di pulau Jawa, dengan produktivitas yang tinggi, yaitu sekitar 51,87 kuintal per hektar. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan sawah di luar Jawa yang hanya memiliki produktivitas sebesar 39,43 kuintal per hektar. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa produksi padi pada tahun 2011 adalah 65,385 juta ton gabah kering giling. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 1,084 juta ton atau 1,63% dari tahun 2010 (Daniel, 2011)

KESIMPULAN

Posisi Politik pangan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono masih berada pada ketahanan pangan, belum bisa mencapai kemandirian apalagi kedaulatan pangan. Sekalipun presiden Soeharto memang hampir menyentuh kemandirian pangan, pada realisasinya beberapa indikator tidak dapat diraih. Begitupun dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya, baik Soeharto maupun Susilo Bambang Yudhoyono memiliki pemikiran

bagus tentang pangan, yang menjadi dasar dari dilaksanakannya berbagai kebijakan pangan di Indonesia. Keduanya berusaha menggenjot produksi pangan dalam negeri, bahkan sempat berhasil mewujudkan swasembada beras, dan diakui oleh FAO, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia dalam hal melepaskan diri dari belenggu krisis pangan.

Kebijakan yang diambil hampir sama. Jika Soeharto memiliki Revolusi Hijau, maka Susilo Bambang Yudhoyono memiliki Reforma Agraria atau Pembaruan Agraria melalui revitalisasi pertaniannya. Keduanya memperlihatkan bahwa kondisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinannya hanya sampai pada posisi ketahanan pangan. Pengaruh yang dimunculkan juga tidak jauh berbeda. Misalnya, kesejahteraan petani yang hingga saat ini masih sangat minim. Permasalahan tersebut belum mampu teratasi dan menjadi permasalahan klasik. Selain itu, masalah juga ditemukan pada pola konsumsi pangan, dimana masyarakat Indonesia mengalami ketergantungan beras sebagai akibat swasembada pangan yang terfokus pada beras. Sisi positif yang dihasilkan dari kedua pemimpin besar tersebut juga hampir sama. Keduanya pernah berhasil meningkatkan produksi pangan dalam negeri meski hanya bertahan sementara, sehingga menyelamatkan Indonesia dari krisis pangan.

Permasalahan tentang pangan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga tanggungjawab masyarakat secara luas. Hal tersebut karena pangan adalah kebutuhan mendasar yang dibutuhkan manusia. Sehingga, adanya kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat akan sangat efektif dalam menangani permasalahan-permasalahan pangan.

REKOMENDASI

Peneliti memberi saran dan rekomendasi bahwa a) Seorang pemimpin, atau katakanlah presiden beserta pemerintah di bawahnya pada sebuah negara, memiliki hak dalam kebijakan tentang pangan. Sehingga, diharapkan kebijakan yang diberlakukan dapat menampung semua aspirasi. b) Para akademisi, terutama yang memang *ekspert* di bidang pangan dapat membantu mengaplikasikan teori yang dimiliki di lapangan. c) Para petani Indonesia, diharapkan mampu membantu pemerintah dengan cara mengembangkan pengetahuannya tentang pertanian pada umumnya, dan pangan pada khususnya. d) Kerjasama tentang pangan bersama pihak luar negeri juga sangat dibutuhkan, karena kondisi pangan Indonesia berkaitan dengan kondisi pangan luar negeri. Bahkan kondisi pasar luar negeri, akan sangat memengaruhi kondisi pasar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muhammad dkk. *Harga Sembako Meroket, Apa Langkah Presiden SBY*. Diakses Melalui <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/427202-harga-sembako-meroket--apa-langkah-presiden-sby>, pada tanggal 23 November 2015, pukul 10.16 WIB.
- Agricenter.jogjapro. Diakses melalui http://agricenter.jogjapro.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=280, pada tanggal 24 November 2015, pukul 11.32 WIB.
- Arifin, Bustanil. 1994. *Pangan Dalam Orde Baru*. Jakarta: Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO).
- Arifin, Bustanul. 2007. *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azzam, Tarman dkk. 2013. *34 Wartawan Istana Bicara Tentang Pak Harto*. Jakarta: UMB Press.
- Daniel, Wahyu. *Krisis Pangan Mengintai, DPR Minta SBY Rajin Cetak Sawah*. Diakses melalui <http://finance.detik.com/read/2011/11/23/192054/1774131/4/krisis-pangan-mengintai-dpr-minta-sby-rajin-cetak-sawah>, pada tanggal 23 November 2015, pukul 07.02 WIB.
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Program pro rakyat pdf. Diakses pada tanggal 24 November 2015, pukul 11.44 WIB.
- Dwipayana, G dan Ramadhan K.H. 1989. *Otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan, Dan Tindakan Saya*. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Efqi, HNI. 2015. *Skripsi: Kebijakan Mangkunegara Iv Dalam Bidang Ekonomi Tahun 1853-1881 Dan Relevansi Hasil Penelitian Dalam Pembelajaran Ips Di Smp*, hal 39. Diakses melalui eprints.uns.ac.id/17960/4/BAB_III.pdf, pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 5.30 WIB.
- Hakim, Jamaluddin. 2016. *Jurnal: Realisasi Kekuasaan World Trade Organization Dalam Kebijakan Pangan Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla*, hal 11. Diakses melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2625/JURNAL.pdf>, pada tanggal 04 Oktober 2018, pukul 10.30 WIB.
- Hariyadi, Purwiyatno. 2011. *Riset Dan Teknologi Pendukung Peningkatan Kedaulatan Pangan*. Jurnal Diplomasi Vol. 3 No. 3, hal 93. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/259255720_Riset_dan_Teknologi_Pendukung_Peningkatan_Kedaulatan_Pangan, pada tanggal 04 Oktober 2018, pukul 20.05 WIB.
- Leedy, Paul D dan Jeanne E. Ormrod. 2010. *Practical Research Planning and Design*. United States of America: PEARSON education.
- Malik, Hermen. 2014. *Melepas Perangkap Impor Pangan Model Pembangunan Kedaulatan Pangan Di Kabupaten Kaur, Bengkulu*. Jakarta: LP3ES.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tahun 2010-2014.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Simatupang, Pantjar dan Wayan Rusastra. 2004. *Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi*, hal: 32. Diakses melalui <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/ekonomi-padi-beras/BAB-II-2.pdf>, pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 09.35 WIB.

SPI. Diakses melalui <http://www.spi.or.id/akankah-pemerintahan-sby-mewariskan-konflik-agraria-kemiskinan-dan-kelaparan/> , pada tanggal 24 November 2015, pukul 05.53 WIB.

Suwirta, Andi dan Iyep Chandra Hermawan. *Masalah Karakter Bangsa dan Figur Kepemimpinan di Indonesia: Prespektif Sejarah*. Diakses melalui A Suwirya - Makalah. Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu ..., 2012 - atikan-jurnal.com, pada tanggal 15 november 2015, pukul 09.47 WIB.

Twonews7. Diakses melalui <http://www.twonews7.com/10-tahun-wacanakan-kemandirian-pangan>, pada tanggal 11 November 2015, pukul 05.49 WIB.

Unisosdem. Diakses melalui http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7621&coid=2&caid=2&gid=2

pada tanggal 22 November 2015, pukul 20.55 WIB.

Usman, Sunyoto. 2004. *Politik Pangan*. Yogyakarta: Cired

<http://bio.or.id/biografi-presiden-soeharto/> pada tanggal 11 November 2015 pukul 04.09 WIB.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2119611/pemerintahan-sby-dinilai-gagal-capai-swasembada-pangan>. Di akses pada tanggal 20 Juni 2015, pukul 20.00 WIB.

<http://soeharto.co/program-pertanian-era-pak-harto> Pak Harto dan Ketahanan Pangan. Di akses pada tanggal 20 Juni 2015, Pukul 19.00 WIB.

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/202134-ini-penyebab-swasembada-5-komoditas-pangan-era-sby-tak-tercapai.html>, pada tanggal 11 November 2015, pukul 05.16 wib.